

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afzalurrahman, 2000, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumy, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th ed., RajaGrafindo, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly, *Paradigma Baru Pembangunan Daerah*.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- G., Kartasapoetra 1998, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Inu Kencana Syafiie, 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama.
- Khakim, Abdul, 2009. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Machmud, 2016, *Penelitian Hukum*, 12th ed., Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Mulyana, Deddy 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Safri, 2007, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI), Jakarta.
- Ranupandojo dan Husnan, Suad. 2012. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Sulisworo dkk, Dwi, 2012, *Geopolitik Indonesia*, Bahan Ajar, Universitas Ahmad Dahlan, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional.
- Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Uwiyono, Aloysius dkk, 2020, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok.
- Winarno, Surahmad 1982, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Bandung, Tarsito.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 7 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 21005.

KARYA ILMIAH

Rauf, Abdul, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

Ayu Fajar, Gabriella T.W., Hermawan, dan Ainul Hayat, “Persepsi Pekerja Terhadap Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (Umk) (Studi Di Kecamatan Sukun Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1, No. 3.

Bihuku, Salmon, 2018 *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Administratum, Volume 6 No. 1, Januari-Maret.

Iqbal Damanik, Muhammad, “Upah Minimum Dalam Politik Media Massa (Studi Analisis Wacana Kritis Keberpihakan Harian Koran Tempo dan Harian Kompas dalam Pemberitaan Polemik Penentuan Upah Minimum Kawasan Industri Bekasi – Jawa Barat),” *Jurnal Ilmu Komunikasi Flow* 1, no. 3 (2013).

Setyaningsih Tri, 2008 *Pengawasan Pemenuhan Upah Minimum Kota (UMK) Pada Perusahaan Swasta Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Setiadi, Wicipto, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, *Majalah Hukum Nasional* Vol. 48 No.2. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Singadimedja, Hollyness N, 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi Atau Resentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemernitahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 2, Nomor 2.

Sonhaji, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.349-364>

SUMBER LAINNYA

Rizki Maulana, “*Tak Naik, Segini Besaran UMP 2021 DKI Jakarta*”,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4394384/tak-naik-segini-besaran-ump-2021-dki-jakarta>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 Jam 21.06 WIB.

Wawancara dengan Jumadi, S.Sos selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 Desember 2021 di Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]